

BAB I

PENDAHULUAN

Berkembangnya struktur pada pola dan tatanan kehidupan sosial masyarakat baik di dunia Barat maupun Timur menyebabkan munculnya beragam fenomena dan pandangan-pandangan baru yang memiliki kontribusi besar terhadap perubahan, terlebih yang menuju ke arah lebih baik. Selain pada struktur sosial dan tatanan masyarakatnya, perubahan juga terjadi pada pemahaman terhadap fungsi serta norma dan nilai yang telah lama mengakar pada sistem yang ada. Dari berbagai fenomena yang terjadi, terdapat salah satu fenomena perubahan yang sangat menarik dan selalu menjadi pokok bahasan di sekitar permasalahan sosial dan pembangunan yaitu mulai berkembangnya pemahaman di kalangan akademisi hingga masyarakat mengenai isu gender.

A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan sebuah konsep pembedaan peran, sifat dan perilaku yang terbentuk oleh adanya kebiasaan, ketentuan atau norma sosial dan budaya yang melekat pada laki-laki atau perempuan. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gender merujuk pada karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang berasal dari adanya konstruksi sosial seperti norma, peran dan hubungan dari dan antara kelompok-kelompok perempuan dan laki-laki. Bentuknya bervariasi dari tiap kelompok masyarakat ke masyarakat dan dapat berubah.¹

Dr. Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial menyatakan, gender adalah sebuah konsep yang menjelaskan suatu sifat yang telah melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan ciri ataupun sifat tersebut dapat dipertukarkan. Sementara perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat

¹ World Health Organization (WHO). *"Gender, equity and human rights"*. www.who.int. [Diakses pada 25 Maret 2017]

yang lain mengikuti pengaruh budaya setempat.² Dari adanya konsep gender ini sesungguhnya tidak menjadi masalah namun yang menjadikan persoalan yaitu adanya perbedaan gender justru melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan.³

Ketidakadilan gender adalah keadaan dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban kerugian dari adanya sebuah sistem ataupun struktur yang terbentuk dari pengaruh tafsir agama, praktik-praktik budaya dan kebiasaan atau regulasi yang ada pada tatanan sosial kemasyarakatan. Namun pada fenomena ketidakadilan gender ini, kaum perempuanlah yang cenderung lebih dirugikan daripada laki-laki. Pelabelan atau *stereotype* terhadap perempuan merupakan salah satu wujudnya, yang pada akhirnya mengakibatkan perempuan mengalami marjinalisasi dan mendapatkan anggapan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Selain hal diatas, ketidakadilan gender juga terjadi akibat berkembangnya ideologi patriarki dimana sistem sosial menempatkan laki-laki pada posisi sebagai sosok otoritas utama yang sentral yang secara tidak langsung menuntut subordinasi perempuan pada posisi dibawahnya dalam susunan masyarakat. Ideologi ini juga menyebabkan perempuan kehilangan otonomi atas dirinya sendiri. Maka dari itu pada sistem patriarki, distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengalami ketimpangan karena laki-laki memiliki hak istimewa dan keunggulan pada satu atau lebih aspek-aspek tertentu.⁴

Timbulnya fenomena ketidakadilan gender memperlihatkan bahwa masih ada penghambat. Perempuan mempunyai peranan penting tidak hanya pada area domestik atau rumah tangga saja namun juga dalam banyak lembaga-lembaga publik seperti pendidikan, ekonomi atau bahkan pada area dimana perempuan memegang posisi penting sebagai

² Fakhri, Mansour (1996). "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.8-9

³ *Ibid.* Hal.12

⁴ Rokhimah, Siti. "*Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*". MUWAZAH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014 Hal.133-134

salah satu penentu pada proses pengambilan kebijakan (*decision making process*) dalam pemerintahan sebuah negara.

Rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam institusi politik dan sosio-ekonomi dapat terjadi karena hegemoni dan peranan kaum laki-laki masih sangat besar pada ruang lingkup tersebut serta aturan atau regulasi pemerintah yang menyulitkan perempuan untuk dapat menyamai kedudukan dengan laki-laki, terlebih pada lembaga dan institusi negara. Republik Turki menjadi salah satu negara dengan tingkat kesenjangan gender (*Gender Gap*) yang cukup tinggi antara kelompok laki-laki dengan perempuan.

Meskipun Turki telah mengambil langkah menuju kesetaraan gender seperti dengan meratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), partisipasi kaum perempuan pada area seperti partisipasi politik, kesehatan reproduksi, jangkauan pendidikan dan akses ketenagakerjaan masih membutuhkan perbaikan yang signifikan⁵ walaupun Turki merupakan negara yang memiliki peradaban maju dan perekonomian negara yang sudah termasuk mapan. Tingkat kesenjangan gender perempuan di dalam masyarakat Turki tergolong masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, hal ini disebabkan oleh budaya dominasi laki-laki dan struktur patriarkhi pada kalangan masyarakatnya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya.⁶ Jika dilihat menurut angka keterwakilan perempuan dalam bidang politik, ketimpangan gender pada parlemen Turki menyebabkan Turki menempati posisi rendah menurut *Gender Gap Index*.

Turki memiliki sejarah panjang dalam upaya mencapai kesetaraan gender, dimulai semenjak era

⁵ Hurriyet Daily News. "Women's participation in politics 'still low' in Turkey". www.hurriyetdailynews.com. [Diakses 29 Maret 2017]

⁶ The Executive Committee for NGO Forum on CEDAW Turkey. "Shadow NGO Report on Turkey's Sixth Periodic Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women". 46th Session of CEDAW, Juli 2010. Hal.9-10

kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk tahun 1923 dimana Turki mengalami masa modernisasi. Atatürk sangat memperhatikan setiap aspek dari kehidupan perempuan, termasuk dari cara mereka berpakaian sebagaimana dengan peran dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Menurutnya perempuan harus bisa berperan aktif dalam ranah publik sebagai seorang individu yang berpendidikan, karena ia percaya bahwa perempuan merupakan “*pillars of society*” sehingga perempuan harus menjadi individu yang berbudi luhur untuk dapat memberikan contoh bagi generasi baru⁷. Pada November 2001, Turki mengambil sebuah langkah besar dengan diratifikasinya amandemen baru oleh *Turkish Grand National Assembly* (TGNA) dalam Hukum Sipil terkait hak-hak perempuan sebagai pemegang peranan penting dalam keluarga yang sebelumnya hanya menempati posisi sebagai subordinat⁸. Semenjak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan berkuasa dimulai dari tahun 2003, secara perlahan sistem pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang lebih moderat dan demokratis.

Non-governmental organizations memiliki kontribusi besar dalam upaya menciptakan keadilan gender di Turki. Peran mereka sebagai gerakan perempuan menjadi krusial karena dalam lingkup kehidupan sosial ekonomi dan politik kaum perempuan masih menghadapi diskriminasi. Hadirnya *Non-governmental organizations* tidak lepas dari ideologi feminisme, ideologi yang menyuarakan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi pada kaum perempuan. Organisasi perempuan menjadi salah satu wujud dari usaha menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki, seperti di institusi pemerintahan Turki yang didominasi oleh laki-laki dilihat dari aspek kuantitas. Namun hal tersebut

⁷ Arat, Necla. “*Women’s Studies in Turkey*”, *Women’s Studies Quarterly*, Vo.;24, No.1/2, Beijing and Beyond: Toward the Twenty-First Century of Women (Spring-Summer, 1996), Hal.401

⁸ Arat, Yesim. “*Women’s Rights and Islam in Turkish Politics: The Civil Code Amendment*”, *Middle East Journal*, Vol/64, No.2 (Spring 2010), Hal.235

tentu tidak mudah untuk dilakukan karena pemimpin di Turki yang masih memiliki pemikiran dan pemahaman terhadap gender atas dasar pengaruh ideologi patriarki dan konsep maskulinitas sehingga memandang rendah kaum perempuan pada tatanan sosial. Ini ditunjukkan oleh apa yang pernah disampaikan Recep Tayyip Erdoğan pada November 2014 setelah dirinya resmi dilantik sebagai presiden Turki, dimana pada saat itu Erdoğan mengeluarkan pernyataan yang sangat objektif mengenai pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia mengulangi pernyataan yang sama seperti dengan yang sebelum-sebelumnya yaitu bahwa “*menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara merupakan salah satu tindakan yang menentang secara alamiah, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah berbeda.*”⁹ Hal tersebut menunjukkan apabila kaum perempuan di Turki secara berkelanjutan masih harus menghadapi diskriminasi negatif baik secara eksplisit maupun implisit.¹⁰

Menurut Sirin Tekeli yang merupakan pendiri KA.DER, usaha yang perlu diperjuangkan ialah mengenai bagaimana membuat perubahan pada pola pemikiran dan nilai-nilai budaya sehingga sistem sosial kemasyarakatan di Turki akhirnya dapat mengakui bahwa kaum perempuan sebagai individu memiliki martabat yang sama dengan individu lainnya, yang dalam konteks ini adalah laki-laki¹¹. Pernyataan tersebut didukung oleh anthropologis Jenny B. White yang menegaskan bahwa hak perempuan (*Women's Rights*) sebagai sebuah konsep tidak benar-benar memiliki resonansi bagi orang-orang di Turki, menyebabkan perempuan di Turki selalu dilihat bukan sebagai individu¹². Individu-individu yang aktif

⁹ Hurriyet Daily News. “*Turkish President Erdoğan says gender equality ‘against nature’*”. www.hurriyetaidailynews.com. [Diakses 27 Maret 2017]

¹⁰ Fairchild, Caroline. “*For Turkey, more women on boards means little*”, <http://www.fortune.com/> [Diakses 1 Juni 2017]

¹¹ Tekeli, Sirin. “*The Turkish Women’s Movement: A Brief History of Success*”, *Quaterns de la Mediterranica*, 14, Tahun 2010. Hal.123

¹² Bohn, Lauren. “*In Turkey, women’s issues gain visibility*”, <http://www.america.aljazeera.com/> [Diakses 30 Mei 2017]

dan bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan merupakan sebuah indikator penting bagi pembangunan negara. Karena hal tersebut menunjukkan adanya fenomena Perempuan dan Pembangunan (WAD), dimana terdapat asumsi bahwa perempuan selalu memiliki posisi penting pada tatanan masyarakat dan pekerjaan yang dilakukannya pada ranah domestik dan publik ataupun komunitas sangat mendasar untuk bisa mempertahankan kelompok mereka serta posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama dan ketika struktur internasional yang ada tetap pada kondisi yang adil¹³ atau setara.

Dalam perkembangannya, terdapat 3 (tiga) *NGO* Perempuan di Turki yang aktif berusaha mendorong terjadinya peningkatan kuantitas tingkat partisipasi perempuan pada level sosio-ekonomi dan politik Turki. Ketiga *NGO* perempuan tersebut mempunyai agenda kegiatan pada fokus atau sasarannya masing-masing sesuai dengan visi, misi serta tujuan organisasinya. *NGO* Perempuan yang pertama adalah KAGİDER (*Türkiye Kadın Girişimciler Derneği*) atau *Women Entrepreneurs Association of Turkey*. *NGO* perempuan ini mempunyai peranan dalam upaya meningkatkan keterlibatan kaum perempuan di bidang sosio-ekonomi, khususnya partisipasi kaumnya pada kegiatan di area pasar, bisnis dan ketenagakerjaan perempuan. Kedua ialah KA.DER (*Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği*) atau biasa disebut dengan *The Association for the Support and Training of Women Candidates*. *NGO* ini memiliki fokus dalam pemberdayaan melalui *capacity building* kaum perempuan guna meningkatkan partisipasi kaumnya pada level partisipasi politik. Kemudian yang ketiga adalah KADEM (*Kadın ve Demokrasi Derneği*) atau *Women and Democracy Association*. *NGO* ini mempunyai fokus pada upaya advokasi penegakan hak-hak perempuan dalam berbagai cakupan bidang, termasuk melakukan program peningkatan partisipasi perempuan di

¹³ Mosse, Julia Cleves. (1996). "Gender dan Pembangunan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.208

lingkup domestik maupun institusi dan lembaga yang memiliki peranan dalam agenda perumusan kebijakan.

Namun dalam proses untuk meningkatkan partisipasi perempuan atau mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Turki tentu tidak dapat lepas dari adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan perempuan pada akhirnya mengalami kendala dalam memperoleh akses mereka, terlebih pada akses partisipasi politik dan akses ekonomi pasar. Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi organisasi perempuan, terlebih bagi ketiga *NGO* Perempuan KAGİDER, KA.DER dan juga KADEM dalam mendorong partisipasi perempuan untuk berperan dalam agenda perumusan kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan negara. Keterlibatan *NGO* perempuan pada pemberian dukungan dan pelatihan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik akan menjadi kontribusi positif bagi transformasi, perkembangan dan kemajuan Turki yang nantinya dapat mencapai sistem pemerintahan yang berkeadilan gender sehingga manfaatnya dapat dinikmati baik oleh laki-laki atau khususnya oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya, kaum perempuan maupun *NGOs* Perempuan sendiri masih sama-sama menghadapi kendala yang telah mengakar kuat pada struktur sosial yang tidak adil di Turki.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM yang dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan di Turki memiliki peranan sentral agar perempuan mampu menjadi partisipasi dalam pembangunan negara, khususnya melalui bidang sosio-ekonomi dan politik. Kemajuan dan perkembangan para perempuan Turki dalam bidang ekonomi dan politik menjadi salah satu alasan mengapa perempuan layak untuk mendapatkan hak merepresentasikan kaumnya karena terciptanya keadilan, efisiensi dan kepentingan umum membutuhkan paling tidak representasi yang setara antara perempuan dan juga laki-laki, salah satunya pada proses pembuatan kebijakan. Sebagai wadah bagi kaum perempuan, banyak dari *NGO* perempuan mulai melakukan upaya

eksplorasi melalui berbagai kegiatan dan pelatihan mengenai bagaimana cara agar perempuan dapat mencapai kelayakan untuk merepresentasikan dirinya. Kepercayaan bahwa perempuan membutuhkan wakil perempuan bukan hanya untuk mewakili sebuah elektorat khusus, tetapi menjadi wakil yang mampu dan layak untuk mewakili perempuan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap aspek kehidupan perempuan seperti pola dan gaya hidup serta status sosio-ekonomi sehingga perempuan di Turki dapat menyuarakan hak-hak perempuan, memperoleh kesejahteraan ekonomi serta dapat menempatkan perempuan dalam berbagai agenda pembuatan kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan mengenai latar belakang masalah diatas, penulis dapat menarik sebuah rumusan masalah, yaitu:

“Bagaimana peran *Non-governmental organizations* dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di Turki?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan analisa terhadap peranan *NGOs* perempuan dan menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan konseptual. Mohtar Mas’oed dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep adalah sebuah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu¹⁴ karena konsep memiliki fungsi sebagai; *pertama*, kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil dari pemikiran tersebut. *Kedua*, untuk memperkenalkan suatu sudut pandang. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan, persepsi dan simbol dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi.¹⁵

¹⁴ Mas’oed, Mohtar. (1994). “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*”. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Hal.93-94

¹⁵ *Ibid.* Hal.95

Konsep merupakan kata yang melambangkan suatu gagasan dimana konsep tersebut digunakan untuk menyederhanakan fenomena yang kompleks.

1. **Konsep Peran *Non-Governmental Organizations***

Aktor berupa negara maupun rezim internasional pada era globalisasi seperti sekarang ini tidak selalu dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang timbul sehingga muncul aktor lain yang memiliki keterlibatan dalam upaya penyelesaian masalah yang tidak dapat dijangkau oleh negara, salah satunya adalah *Non-Governmental Organizations*.

Dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*, David Lewis menyebutkan bahwa sebuah *NGO* pada dasarnya memiliki 3 (tiga) peranan utama yaitu¹⁶:

a. *The Implementer Role*

NGO yang masuk dalam kategori ini didefinisikan sebagai *NGO* yang berusaha melakukan mobilisasi sumber daya yang ada dengan memberikan bantuan dorongan dalam bentuk barang ataupun layanan tertentu kepada mereka yang membutuhkan melalui agenda yang sudah menjadi bagian dari proyek dan program *NGO* mereka atau proyek dan program yang mendapat pendanaan dari pemerintah maupun lembaga donor terkait.

Biasanya yang menjadi agenda merupakan jenis proyek dan program yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, usaha kredit mikro, penyuluhan dan pelatihan atau *training*, bantuan penasehat hukum ataupun konseling terkait hak asasi hingga pemberian bantuan tanggap darurat

¹⁶ Lewis, David. (2005). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*. London: Routledge. Hal.68-69

saat terjadi bencana. *NGO* kategori ini juga dapat menjalankan proyek tertentu yang sebenarnya merupakan proyek dari pemerintah atau lembaga-lembaga terkait dengan syarat *NGO* tersebut mendapatkan bayaran sebagai imbalannya.

b. *The Role of Catalyst*

Pada kategori ini, *NGO* memiliki peranan katalis yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk dapat memberikan inspirasi, dorongan, dukungan fasilitas atau kontribusi untuk meningkatkan pemikiran, cara pandang, kemampuan dan kapasitas serta sebagai bentuk dari aksi nyata usaha pembangunan yang menuntut adanya perubahan pada struktur sosial di masyarakat.

Bentuk peranannya seperti upaya pengorganisasian pada level akar-rumput dan usaha pengorganisasian kelompok, pendekatan dengan cara pemberdayaan sebagai salah satu cara pengembangan potensi, serta upaya *lobbying* dan juga advokasi dimana *NGO* tersebut secara luas berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu *NGO* pada kategori ini juga dapat melaksanakan perannya dengan cara melakukan kampanye (*campaign*) yang membawa agenda dan isu-isu tertentu seperti pada isu ketidaksetaraan gender dan kebijakan wiraswasta.

c. *The Role of Partner*

NGO dalam kategori ini mempunyai kecenderungan sebagai *NGO* yang melaksanakan pekerjaannya dengan melakukan *joint activities* bersama pemerintah, lembaga donor maupun sektor swasta dan tidak menutup kemungkinan dengan *NGO* yang lainnya pula misalnya untuk kegiatan seperti pembangunan kapasitas (*capacity building*) sebagai upaya peningkatan kapabilitas.

Adanya retorika baru seperti menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan agenda kerja ini menjadi tantangan bagi *NGO* agar hubungan yang dibangun melalui kemitraan bermakna dan guna menghindari adanya ketergantungan, kooptasi serta tujuan yang tidak sesuai.

Dari penyajian diatas, berdasarkan jenis kategori peranan *NGO* menurut David Lewis, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan ketiga model pendekatan yang dianggap dapat digunakan untuk menjelaskan peranan KAGIDER, KA.DER dan KADEM dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi kaum perempuan di Turki. Ketiga pendekatan tersebut adalah peranan *NGO* sebagai implementer (*The Implementer Role*), peranan *NGO* sebagai katalis (*The Role of Catalysts*) dan peranan *NGO* sebagai mitra (*The Role of Partner*). Ketiga pendekatan yang penulis gunakan dianggap mampu untuk melakukan analisa mengenai peran KAGIDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGO* perempuan dalam upayanya meningkatkan partisipasi perempuan di sektor sosio-ekonomi dan politik.

Pemaparan mengenai pengaplikasian dari pendekatan *The Implementer Role*, *The Role of Catalysts* dan *The Role of Partner* pada wujud pemberdayaan oleh KAGIDER, KA.DER dan KADEM dapat dijelaskan sebagai berikut.

KAGIDER, KA.DER dan KADEM dalam perannya sebagai *The Implementer* dapat diketahui melalui upaya ketiga *NGO* perempuan dalam proses menjalankan proyek ataupun program yang berasal dari ketiga *NGO* itu sendiri maupun proyek dan program yang sebenarnya milik pemerintah dan lembaga atau instansi tertentu baik dari lingkup nasional maupun internasional yang sifatnya mampu mendorong dan menggerakkan kaum perempuan agar menjadi lebih berdaya dengan adanya agenda kegiatan dan fasilitas seperti pelatihan, konseling hingga bantuan pendanaan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi sasaran dalam proyek tersebut.

Kemudian KAGİDER, KA.DER dan KADEM dapat menjalankan proyek ataupun program yang bukan merupakan agenda dari organisasinya melainkan milik pemerintah atau lembaga lain karena mereka telah menerima *support* anggaran dana sebagai biaya operasional dari setiap aktivitas yang dilakukan.

Peranan sebagai *The Role of Catalysts*. KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGO* perempuan yang terlibat aktif pada upaya mendorong partisipasi perempuan di Turki melakukan agenda kegiatannya dengan memberikan sebuah dorongan yang dapat menginspirasi, selain itu mereka juga memberikan fasilitas kepada perempuan guna meningkatkan kapasitasnya. Perempuan yang dilibatkan tidak hanya dari kalangan menengah keatas, perempuan dari golongan akar-rumput juga dapat terlibat Ini karena pada peranan katalis, *NGO* menempatkan posisinya sebagai pembela masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai bentuk upaya advokasi terhadap perempuan itu sendiri. KAGİDER, KA.DER dan KADEM memberikan stimulus, mendorong dan memotivasi perempuan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan dimana perempuan-perempuan Turki yang berpotensi terus diasah sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam dirinya. Disamping itu berbagai pelatihan, seminar serta diskusi dan dialog antar perempuan juga dilaksanakan guna menambah wawasan para perempuan sehingga lebih siap dalam menghadapi permasalahan di sektor publik yang biasanya hanya merupakan bagian untuk kaum laki-laki.

Selain itu, kampanye (*campaign*) juga menjadi salah satu agenda mereka dalam mempengaruhi opini publik dan masyarakat Turki baik perempuan maupun laki-laki. Tujuannya agar masyarakat menjadi sadar akan hak-hak perempuan sehingga mereka, khususnya kaum perempuan, turut berpartisipasi dalam agenda pemberdayaan yang dapat memajukan dan memberikan manfaat bagi diri mereka. Pada peranan katalis ini, *NGO* perempuan juga mempunyai kegiatan yang berbentuk lobi (*lobbying*) sebagai salah satu cara mempengaruhi proses perumusan kebijakan-kebijakan,

terlebih kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Upaya aktif ini tidak lain bertujuan agar agenda pemerintah yang terkait isu-isu perempuan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan sehingga *NGO* dapat membentuk jaringan kuat dari organisasinya untuk melindungi hak-hak perempuan.

Sedangkan melalui peranannya *The Role of Partner*, KAGİDER, KA.DER dan KADEM menjalin hubungan dengan beberapa mitra atau *partner* sebagai bentuk kerjasama dalam upaya memerangi kesenjangan gender yang menjadi hambatan pada struktur tatanan sosial Turki. Kerjasama juga dapat diutamakan pada persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan bagi perempuan Turki. Kerjasama yang digagas dalam bentuk *joint activities* dapat dilakukan dengan beberapa aktor penting seperti institusi maupun lembaga pemerintahan, lembaga donor dan juga tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan *NGO* lain yang memiliki tujuan sama.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM melakukan usaha yang mengangkat fenomena kesenjangan gender dan upaya pemberdayaan kaum perempuan dengan cara mencari dukungan dari mitra-mitra penting yang dapat memberikan kontribusi positif melalui jalur *partnership* atau kerjasama dengan mereka. Peluang terbentuknya jaringan kerjasama oleh *NGO* perempuan ini tidak menutup kemungkinan hanya pada level lokal atau yang sesama berasal dari Turki saja tetapi juga pada level regional dan internasional yang melibatkan pihak-pihak eksternal yang berada diluar Turki.

Penulis melihat bahwa peran KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGO* memiliki kecenderungan selalu mengarah pada bentuk upaya pemberdayaan melalui proyek atau program tertentu. Jika menurut Gunawan Sumodiningrat¹⁷, peran mereka termasuk pada kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses pemberian stimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kelompok tersebut

¹⁷ Rakhman, Anita. "Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat". www.anita-rakhman.dosen.stkipsiliwangi.ac.id. Diakses 6 April 2017

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk dapat menentukan apa yang menjadi pilihan serta tujuan.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesa bahwa Peran *NGO* Perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Turki ialah melalui:

1. Bantuan dorongan dan dukungan dalam bentuk barang ataupun layanan dari proyek dan program dengan pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor.
2. Kegiatan pelatihan, advokasi, lobi dan kampanye yang menginspirasi, mendorong, mendukung pengembangan dan peningkatan kapabilitas perempuan.
3. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga donor, sektor swasta maupun organisasi lain dalam menjalankan agenda kegiatannya.

E. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana peran KAGIDER, KA.DER dan KADEM pada agendanya meningkatkan partisipasi kaum perempuan di Turki dalam konteks bidang sosio-ekonomi dan politik.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan disertai data dan fakta lapangan yang ada serta sebagai wujud pembuktian dari hipotesis dengan konsep-konsep yang digunakan.
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan dijelaskan melalui karya tulis ini, jangkauan penelitian mengenai peran *NGO* perempuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Turki hanya akan membahas selama era kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dalam rentang kurun waktu dari tahun 2004 – 2016.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya eksplanatif. Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis berusaha untuk dapat menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi serta fenomena yang terkait dengan permasalahan yang telah diajukan. Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang akan penulis gunakan pada penulisan skripsi ini merupakan data-data kualitatif.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan model menghimpun berbagai informasi, analisis, konsep-konsep serta pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal, artikel, berita atau media cetak yang memiliki keterkaitan dengan tema yang ditulis. Sedangkan, metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah dengan metode kontekstual dan kategorial. Yang dimaksud dengan metode kontekstual ialah mencari data-data dan informasi yang sesuai dengan dimensi waktu, kemudian data-data yang ditemukan akan dicocokkan dengan kategori-kategori yang sebelumnya telah dikelompokkan berdasarkan pada definisi konseptual yang ada pada kerangka pemikiran.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas susunan lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang sifatnya umum dan mendasar yang kemudian selanjutnya akan menjadi sebuah titik tolak bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Perkembangan Feminisme di Turki dan Lahirnya Organisasi Berbasis Perempuan sebagai Wujud dari Gerakan Sosial yang Baru merupakan bab yang akan menjelaskan konteks sejarah fenomena munculnya gerakan berbasis keorganisasian perempuan (*women's movement*) di Turki serta pemaparan mengenai KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGOs* perempuan yang berperan dalam melakukan advokasi perempuan.

Bab III Kesetaraan Gender dalam Hukum Negara dan Posisi Perempuan pada Sektor Publik di Turki merupakan bab yang berisi tentang pembahasan terkait konstitusi, hukum serta undang-undang mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender pada aspek kehidupan sosial di Turki. Kemudian akan dipaparkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Turki serta kondisi kaum perempuan, khususnya dalam sektor sosio-ekonomi dan politik.

Bab IV KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai NGO yang Berperan dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik merupakan bab yang akan menjawab hipotesa dengan pengaplikasian Konsep Peran *Non-Governmental Organizations* untuk menjelaskan bagaimana peranan KAGİDER, KA.DER dan KADEM dalam upayanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang sosio-ekonomi dan politik di Turki.

Bab V Kesimpulan merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari setiap pembahasan yang ada pada penulisan karya tulis ini. Kesimpulan tersebut merupakan ringkasan dari setiap isi perbab yang kemudian digabung menjadi satu gabungan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada Bab Pendahuluan.

